

Inovasi Pelayanan Pendidikan (Studi Kasus: Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (Spp) Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep)

Maria Ulfa^{1*}, Abdul Mahsyar², Adnan Ma'ruf³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study to determine the characteristics of Educational Services Innovation (Case Study: Free Educational Assistance Donation Program For Pangkep Regency Students). The number of informants in this study was 14 people. This study used a qualitative approach and the type of descriptive research and case studies. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The result of this study showed that the characteristics of educational service innovation (case study: free educational assistance donation program for pangkep regency students) had fulfilled the five characteristics of innovation according to Roger, namely relative advantage, compability, complexity, triability, and observability. But the implementation still required quite a long time or was not yet effective.

Keywords: *innovation, educational service, free tuition*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik Inovasi Pelayanan Pendidikan (Studi Kasus: Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 14 orang. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif dan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik inovasi pelayanan pendidikan (studi kasus: program sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis bagi mahasiswa kabupaten pangkep) sudah memenuhi lima karakteristik inovasi menurut Roger yaitu keuntungan relatif (*Relative advantage*), Tingkat Kesesuaian (*Compatibility*), Tingkat Kerumitan (*complexity*), Kedapatdicobaan (*Triability*), dan Tingkat Kemudahan Diamati (*Observability*). Akan tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan waktu yang cukup lama atau belum efektif.

Kata kunci: inovasi, pelayanan pendidikan, spp gratis

* mariaulfa88@gmail.com

PENDAHULUAN

Inovasi pelayanan publik tidak bisa tidak dilakukan lagi termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi dalam pelayanan publik merupakan suatu yang sangat penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghasilkan pelayanan yang kompetitif dengan menggunakan konsep yang dikembangkan dalam sektor bisnis dalam dekade terakhir ini (Mirnasari, 2013).

Dengan banyaknya permasalahan yang muncul dalam kinerja pelayanan organisasi publik, kondisi pemerintah yang berada berada dalam zona nyaman, berbagai urusan pemerintah sangat dinamis untuk ditangani segera, tuntutan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan bahwa inovasi dalam sektor publik penting untuk dilakukan LAN (Mulyadi, dkk, 2018). United Nation's Departement of Economic and Social Affairs (UNDESA) mengakui bahwa inovasi di sektor publik itu penting. Penghargaan ini dirancang dan dibuat sedemikian rupa untuk dapat meningkatkan peran, *visibility* serta profesionalisme kedalam pelayanan publik dengan menggunakan tiga kategori dasar yaitu perbaikan pelayanan publik, akuntabilitas,

transparansi dan, dengan cara aplikasi ICT atau e-Government (Suwarno, 2008).

Dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk penyelenggaraan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan inovasi daerah dalam meningkatkan prestasi kerja oleh penyelenggaraan pemerintah daerah sasaran inovasi daerah diarahkan agar mampu mewujudkan kesejahteraan bagi setiap lapisan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat seperti dengan melakukan pemberdayaan dan memberikan peran kepada masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah salah satunya berbentuk inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah khususnya inovasi pelayanan publik merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan.

Masyarakat masih diposisikan sebagai pihak "melayani" bukan dilayani keadaan ini diakibatkan masyarakat setiap saat selalu menuntut

pelayanan publik yang berkualitas dari para birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan hal-hal seperti berbelit-belit, lamban, mahal, melelahkan, ketidakpastian (Mahsyar, 2011).

Pelayanan publik adalah melayani keperluan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 : “ Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik” (Mulyadi, 2016).

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam hal ini diperlukan peningkatan dan penerapan sistem yang bertanggung jawab dengan baik, tepat, jelas, serta

legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan berdayaguna, berhasil, dan bertanggung jawab, serta bebas dan Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Sedarmayanti, 2012).

Menurut Asian Development Bank, Inovasi adalah sesuatu yang baru dapat di implementasikan, dan memiliki dampak menguntungkan. Inovasi bukan sebuah kejadian ataupun aktivitas ; inovasi adalah konsep, proses, penerapan. Dan kapabilitas yang menentukan kesuksesan dalam organisasi. Dengan adanya inovasi sektor publik dapat terbantu dalam membuat nilai untuk masyarakat (Junior, 2016).

Inovasi berarti mengenalkan hal-hal yang baru, baik itu produk, ide, objek maupun metode yang akan berdampak pada perubahan. Perubahan terjadi akibat diperkenalkan dan diterapkannya sesuatu yang baru, dengan kebaruan terjadi penyesuaian-penyesuaian dalam interaksi sehingga akan mendorong pada perubahan dalam interaksi tersebut. Inovasi merupakan suatu perwujudan dari ide kreatif dalam upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan di masa depan.(Suharsaputra, 2013).

Roger (Suharsaputra, 2016) menyebutkan karakteristik inovasi

sebagai berikut: (a) *Relative advantage*, tingkat keuntungan relatif dari suatu inovasi. suatu inovasi bisa diterima jika dilihat mampu memberikan manfaat yang lebih besar dari apa yang diperoleh sebelumnya. (b) *Compatibility*, menunjukkan tingkat kesesuaian antara inovasi dengan kondisi dan apa yang diharapkan masyarakat seperti faktor nilai, ide-ide yang telah diperkenalkan sebelumnya, serta apa yang dibutuhkan para adopter potensial. (c) *Complexity*, merupakan tingkat kerumitan inovasi. Makin sederhana dan mudah dipahami suatu inovasi akan semakin mudah diterima oleh pengguna potensial inovasi, semakin rumit suatu inovasi maka akan sulit juga masyarakat untuk menerima inovasi tersebut. Inovasi perlu dilakukan formulasi dalam bentuk sederhana, karena semakin sederhana suatu inovasi semakin tinggi dan cepat diadopsi. (d) *Trialability*, menunjukkan kedapatdicobaan suatu inovasi. suatu inovasi yang dapat dicoba dengan mudah maka dapat mempercepat penerimaan sebuah inovasi dalam masyarakat. (e) *Observability*, menunjukkan tingkat dimana hasil inovasi dapat diamati, karena semakin mudah diamati sebuah inovasi maka semakin cepat masyarakat dapat menerima sebuah inovasi.

Karakteristik inovasi ini yang akan menjadi alat ukur yang digunakan untuk melihat Inovasi Pelayanan Pendidikan (Program Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Pangkep).

Pada dasarnya pendidikan gratis merupakan penyelenggaraan pendidikan yang tidak memungut biaya dari orang tua, semua kebutuhan operasional diupayakan lewat APBD, dan besaran dana dihitung sesuai unit cost setiap siswa. Untuk membuka akses luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan hak bagi warga negara, pemerintah memberikan kebijakan melalui upaya pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah (Yuliana, 2015:4).

Dasar diberlakukannya pendidikan gratis adalah Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 berbunyi: 1) Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa memungut biaya dan 2) wajib belajar merupakan sebuah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, hakekat kesejahteraan sosial adalah menjamin setiap warga negara untuk memenuhi

kebutuhan dasarnya. Pendidikan yang layak adalah salah-satu kebutuhan dasar bagi warga negara. Tekad pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga menjadi pendorong dalam mewujudkan pendidikan untuk semua. Hal ini tidak terlepas dari persoalan menyangkut harkat dan martabat bangsa di mata dunia yang berkaitan dengan hak asasi manusia sehingga pemerintah membuat kebijakan pendidikan gratis di Indonesia. (Muhajidun, 2016).

Pergeseran transformasi kehidupan manusia akibat globalisasi, sistem informasi dan komunikasi yang semakin canggih menuntut pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manusia yang dilahirkan dari proses pendidikan sangat bergantung dari corak dan jenis pendidikan yang dijalankan. Corak dan jenis pendidikan akan ditentukan oleh kebijakan pemerintah, peran masyarakat dan peran praktisi pendidikan. Namun demikian keterlibatan pemerintah sebagai salah satu aktor terpenting dalam peningkatan kualitas sumber daya pemerintah berada lebih dari keterlibatan masyarakat dan para praktisi pendidikan, karena hakekatnya kebijakan pemerintah menjadi dominian dalam menjalankan proses pendidikan (Muhajidun, 2016).

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep membuat suatu program yang inovatif yaitu: Penyelenggaraan Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis bagi mahasiswa Pangkep dengan maksud untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai lembaga sosial yang kuat dan beribawa untuk memberdayakan warga Pangkep agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mendukung percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat (Zaenal, 2017).

Adapun tujuan dilaksanakannya program tersebut adalah: (a) Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi; (b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai disiplin ilmu; (c) Meningkatkan relevansi pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan global; (d) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas SDM yang unggul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Dengan tipe penelitian deskriptif dan studi kasus. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, Kepala seksi kurikulum SMP yang menangani SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep, staff kurikulum SMP yang menangani SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep, mahasiswa penerima SPP gratis, dan masyarakat umum. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan, dokumen yang bersifat informasi tertulis dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari internet, koran, dan media-media lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan terkait dengan inovasi pelayanan pendidikan: program sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dalam teknik analisa data digunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Dan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu:

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) Provinsi Sulawesi Selatan dikenal dengan julukan Kabupaten “Tiga Dimensi”. Kabupaten Pangkep merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai keragaman dimensi wilayah yaitu: wilayah daratan, pegunungan dan kepulauan. Menjadikan Kabupaten ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan terbentang dari perairan hingga ke pegunungan.

Kabupaten Pangkep terletak antara 110° BT dan 4°, 40° LS sampai dengan 8° 00 LS atau terletak di pantai Barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut: (a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru. (b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros. (c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone. (d) Sebelah Barat berbatasan dengan pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Madura, NTT, NTB dan Bali.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 Kecamatan, 9 Kecamatan terletak di daratan dan 4 Kecamatan terletak di kepulauan dengan luas wilayah 1.112,29 Km² dan

berjarak 51 Km dari Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Minasatene, Marang, Segeri dan Maddalle. Wilayah Pegunungan Kecamatan Balocci dan Kecamatan TondongTallassa. Wilayah Kepulauan terdiri dari empat Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Data pulau yang berada di Kabupaten Pangkep, yaitu: jumlah pulau 115 pulau terdiri dari pulau berpenghuni 73 pulau dan yang tidak berpenghuni 42 pulau.

Lokasi penelitian penulis berada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Dinas Kabupaten Pangkep berada di Jl. Andi Mappes Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro (poros Pangkep-Pare-pare), Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan (90615). Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep merupakan tempat penyelenggaraan program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep. Dewasa ini sudah nampak betapa beratnya untuk membangun pendidikan dalam era global, dengan melihat perkembangan globalisasi dan kondisi internal pendidikan bangsa. Dengan kondisi pendidikan masih relatif rendah upaya

untuk melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan untuk terus dilakukan, karena dituntut perlunya sikap inovatif untuk mampu bersaing di era globalisasi saat ini (Suharsaputra, 2016).

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep membuat suatu program yang inovatif yaitu: Penyelenggaraan Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis bagi mahasiswa Pangkep dengan maksud untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai lembaga sosial yang kuat dan beribawa untuk memberdayakan warga Pangkep agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mendukung percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat (Zaenal, 2017).

Bupati Kabupaten Pangkep melihat data bahwa lulusan SMA/SMK di Kabupaten Pangkep masih rendah yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga Bupati berfikir mungkin kendalanya adalah persoalan biaya. Bupati Kabupaten Pangkep menyampaikan bahwa semua alumni SMA/SMK harus diusahakan menjadi sarjana, persoalan biaya SPP adalah urusan pemerintah.

Dengan adanya Program ini dilihat bahwa jumlah mahasiswa setiap tahun mulai bertambah mulai tahun

2017 sampai 2019 sehingga setiap tahun pemerintah Kabupaten Pangkep menambah anggaran untuk program ini. Pada tahun 2017 kelompok sasaran penerima SPP gratis adalah mahasiswa angkatan 2013 sampai angkatan 2016, pada semester ganjil jumlah penerima 3489 orang dengan total anggaran Rp. 5.190.181.000 berbeda dengan semester genap jumlah mahasiswa penerima semakin meningkat yaitu 4066 orang dengan total anggaran Rp. 6.009.819.000, jadi total anggaran yang digunakan pada tahun 2017 adalah Rp. 11.200.000.000.

Pada tahun 2018 kelompok sasaran penerima SPP gratis adalah mahasiswa angkatan 2014 sampai angkatan 2017, pada semester ganjil jumlah penerima sebanyak 4501 orang dengan total anggaran yang digunakan adalah Rp. 5.905.000.000, dengan bertambahnya jumlah penerima sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep berinisiatif untuk membagi anggaran agar semua mahasiswa yang telah melakukan permohonan bisa mendapatkan SPP gratis ini dengan cara melakukan pemotongan dana Rp. 300.000 per mahasiswa tetapi hal ini menuai pandangan negatif dari masyarakat terutama mahasiswa sehingga Pemerintah Daerah menambah anggaran tersebut dan dibayarkan

kembali pada semester genap adapun jumlah anggaran tambahan pada semester ganjil Rp. 1.110.882.000. Pada semester genap 2018 jumlah mahasiswa penerima SPP gratis sebanyak 4.277 orang dengan anggaran yang digunakan adalah sebanyak Rp.6.745.591.000, jadi total anggaran yang digunakan sepenuhnya pada tahun 2018 adalah 14.070.928.000.

Pada tahun 2019 Pada tahun 2018 kelompok sasaran penerima SPP gratis adalah mahasiswa angkatan 2015 sampai angkatan 2018. Jumlah mahasiswa penerima SPP gratis pada tahun 2019 semakin meingkat dari tahun sebelumnya adalah sebanyak 5230 orang dengan total anggaran yang digunakan adalh Rp. 8.563.986.625.

Peneliti kemudian lebih lanjut akan membahas karakteristik inovasi pelayanan pendidikan: Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep yaitu: (1) Keuntungan relatif (*Relative advantage*) (2) tingkat kesesuaian (*Compatibility*) (3) Tingkat kerumitan (*complexity*) (4) Kedapatdicobaan (*Triability*) (5) Tingkat kemudahan diamati (*Observability*).

Keuntungan relatif adalah suatu inovasi bisa diterima jika dilihat mampu memberikan manfaat yang lebih besar

dari apa yang diperoleh sebelumnya (Suharsaputra, 2016). Teori Roger dalam keuntungan relatif, efektivitas menjadi ukuran suatu kebaruan bisa diadopsi oleh karena itu ketika kebaruan ditetapkan maka pertimbangan manfaat menjadi penting dalam penerapan sebuah inovasi.

SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep ini memiliki manfaat yang sangat besar khususnya bagi mahasiswa yang berasal dari Pangkep, serta program ini juga lebih baik untuk kemajuan daerah Pangkep kedepannya karena program ini juga dinilai mampu meningkatkan pemerataan pendidikan Kabupaten Pangkep. Dikatakan demikian karena semakin banyak tamatan SMA/SMK yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mahasiswa juga tidak terbebani lagi dengan masalah pembayaran SPP persemester meskipun yang dibayarkan hanya maksimal dua juta rupiah. Peneliti juga melihat sebagian mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep sangat berharap pada program ini termasuk dari kalangan mahasiswa yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Penyaluran dana SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep belum efektif karena masih membutuhkan waktu yang sangat lama dalam

pengimputan data. Salah satu hal yang menyebabkan pengimputan data membutuhkan waktu yang lama yaitu beberapa mahasiswa belum memasukkan berkas yang diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Padahal ketika para mahasiswa memasukkan dengan cepat bisa lebih mempercepat pencairan SPP gratis ini. Selain itu, tahap validasi ke kampus juga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Peneliti menyimpulkan bahwa Program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep memiliki keuntungan relatif (*relative advantage*) karena mempunyai manfaat yang sangat besar salah satunya pemerataan pendidikan di Kabupaten Pangkep untuk menghasilkan Sumber daya manusia yang berkarakter dan unggul. Program ini mampu memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Pangkep, meskipun pelaksanaannya belum efektif karena disebabkan oleh berbagai faktor.

Menunjukkan tingkat kesesuaian antara inovasi dengan kondisi dan apa yang diharapkan masyarakat seperti faktor nilai, ide-ide yang telah diperkenalkan sebelumnya, serta apa yang dibutuhkan para adopter potensial (Suharsaputra, 2016). Teori Roger dalam tingkat kesesuaian dijelaskan

bahwa dalam sebuah penerapan inovasi harus sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat. Maka penulis akan menampilkan hasil reduksi data tentang tingkat kesesuaian (*Compatibility*).

Sesuai pengamatan langsung yang dilakukan peneliti kondisi penerapan SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep sangat sesuai karena bisa dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang merespon baik atau memberi kesan positif dengan adanya program ini terutama mahasiswa. Mereka sangat antusias datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep memasukkan persyaratan untuk mendapatkan program tersebut, kemudian pada saat diumumkan bahwa SPP tersebut sudah bisa dicairkan pada hari pertama peneliti melihat kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep dipadati oleh mahasiswa, mereka rela antri untuk mendapatkan surat rekomendasi, meskipun pengambilan rekomendasi bisa sampai tiga bulan kedepan. Selain mahasiswa, terlihat juga beberapa orang tua/ wali yang datang untuk mewakili anaknya dalam pengambilan surat rekomendasi. Kondisi Kabupaten Pangkep sangat sesuai dengan penerapan SPP gratis karena sebagian dari masyarakat Kabupaten Pangkep

adalah masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah sehingga dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mereka sangat terbantu dengan adanya Program SPP gratis yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep. Program ini juga menjadi alat untuk menciptakan sumber daya manusia dalam berbagai disiplin ilmu di Kabupaten Pangkep.

Selain daripada kondisi ekonomi masyarakat, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat kabupaten Pangkep, pemerintah daerah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk program SPP gratis bagi mahasiswa, karena melihat kondisi kabupaten juga bisa dikatakan bahwa memang mampu melaksanakan program tersebut dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah berharap dengan adanya program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep tidak ada lagi alumni SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, pemerintah daerah juga berharap agar kedepannya program ini bisa lebih ditingkatkan demi meningkatnya mutu pendidikan di Kabupaten Pangkep. Program ini juga dianggap berhasil karena dilihat dari data yang ada bahwa ada peningkatan jumlah mahasiswa penerima SPP gratis setiap tahunnya.

Peneliti menyimpulkan bahwa Program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep memiliki tingkat kesesuaian (*Compatibility*) karena sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat.

Merupakan tingkat kerumitan inovasi. Makin sederhana dan mudah dipahami suatu inovasi akan semakin mudah diterima oleh pengguna potensial inovasi, semakin rumit suatu inovasi maka akan sulit juga masyarakat untuk menerima inovasi tersebut (Suharsaputra, 2016). Teori Roger dalam tingkat kerumitan (*complexity*) menunjukkan bahwa inovasi akan diterima oleh masyarakat ketika mudah dipahami atau memiliki lebih banyak tingkat kemudahan di dalamnya. Bahwa ketika mahasiswa mengikuti aturan dan melengkapi setiap berkas yang dijadikan persyaratan untuk mendapatkan SPP gratis ini tidak ada kerumitan dan, karena kerumitan yang dihadapi oleh staff pelaksana SPP gratis sebagian besar bersumber dari mahasiswa yang banyak memasukkan berkas pada tahap akhir pengumpulan berkas, sehingga para staff pelaksana program SPP gratis kewalahan dalam pengimputan data. Syarat yang diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep cukup mudah, karena semua berkas yang dijadikan sebagai syarat sudah dimiliki oleh mahasiswa

penerima. Mahasiswa hanya direpotkan dalam pengambilan surat keterangan aktif kuliah di kampus. Kemudian berkas tersebut dimasukkan ke dalam map *business file* dengan warna yang telah ditentukan dengan tahun angkatan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tidak adanya struktur yang digunakan sebagai dasar pembagian tugas dalam mengimplementasikan program SPP gratis ini, tetapi untuk lebih memudahkan pelaksanaan program ini tetap ada pegawai yang diberikan wewenang untuk bertanggungjawab pada setiap angkatan. Jadi ketika mahasiswa datang membawa berkas yang telah dimasukkan ke dalam map *business file* diarahkan ke pegawai sesuai dengan tahun angkatannya.

Selain dari kemudahan berkas yang disiapkan, peneliti melakukan pengamatan langsung bahwa program SPP gratis ini memiliki tingkat kemudahan dalam pelaksanaannya, dalam pengumpulan berkas maupun pengambilan surat rekomendasi bisa diwakili oleh orang tua maupun wali dari mahasiswa. Untuk mendapatkan program SPP gratis ini syarat utamanya adalah hanya merupakan penduduk Kabupaten Pangkep dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep tidak menjadikan nilai IPK sebagai acuan dalam program ini, sehingga semua

yang mahasiswa yang berasal dari Pangkep berhak mendapatkan SPP gratis ini tanpa terkecuali meskipun berasal dari keluarga yang mampu selama mereka memasukkan berkas yang telah ditetapkan dan tidak dalam masa cuti. Selain daripada itu dilihat bahwa di era zaman yang sangat modern ini penyampaian pengumuman pengumpulan berkas dan pencairan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada saat ini yaitu pengumuman disampaikan melalui media online sehingga dengan sangat cepat para mahasiswa mengetahui pengumuman tersebut.

Peneliti menyimpulkan bahwa program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep memiliki tingkat kerumitan (*complexity*) lebih rendah dibanding tingkat kemudahan dalam program ini, atau bisa dikatakan bahwa program ini memiliki lebih banyak kemudahan daripada kerumitan, sehingga program ini direspon baik oleh masyarakat Kabupaten Pangkep.

Triability menunjukkan kedapatdicobaan suatu inovasi. Suatu inovasi yang dapat dicoba dengan mudah maka dapat mempercepat penerimaan sebuah inovasi dalam masyarakat (Suharsaputra, 2016). Menurut Roger, inovasi yang tepat

harus bisa diujicobakan kemudian menampilkan manfaat dan kerumitannya. Roger juga berpendapat bahwa suatu inovasi jika semakin bisa diujicobakan maka akan cepat diterima dalam masyarakat.

SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep sebelum menjadi program rutin pernah diujicobakan sebelumnya, program ini awalnya dilakukan di provinsi pada tahun 2014 kemudian pada tahun 2016 di ujicobakan di Kabupaten Pangkep. Program ini sedikit berbeda dengan program SPP gratis yang dilaksanakan di Provinsi, perbedaannya adalah di Kabupaten Pangkep tidak ada standar IPK yang dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan SPP gratis.

Setelah diujicobakan Program ini dinilai mampu memberikan pengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan dan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Pangkep sehingga Pemerintah daerah menjadikan program ini sebagai program rutin pada tahun 2017 sampai sekarang. Peneliti melihat data yang diperlihatkan oleh kurikulum SMP bahwa jumlah mahasiswa penerima SPP gratis setiap tahun mengalami peningkatan hal ini membuktikan bahwa program ini cukup berhasil, pengamatan langsung peneliti.

Peneliti menyimpulkan bahwa program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep sebelum dijadikan Program rutin pernah diujicobakan sebelumnya kemudian dilihat pengaruh dan manfaat yang ditimbulkan, program ini juga bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pangkep dan kemudian program ini dijalankan tiga tahun berturut-turut.

Menunjukkan tingkat dimana hasil inovasi dapat diamati, karena semakin mudah diamati sebuah inovasi maka semakin cepat masyarakat dapat menerima sebuah inovasi (Suharsaputra, 2016). Menurut Roger, semakin mudah diobservasi hasil suatu inovasi semakin tinggi dan cepat diadopsi. Maka penulis akan menampilkan hasil reduksi data tentang tingkat kemudahan diamati (*observability*).

Dalam program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep prestasi bukan merupakan tujuan utama dalam program ini, melainkan Pemerintah Daerah menginginkan tidak ada lagi alumni SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Melalui program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep, Pemerintah daerah berharap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pangkep terus meningkat.

Program ini juga dinilai mampu meningkatkan nilai jual pemerintah

daerah dalam peningkatan mutu pendidikan, terbukti dengan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep dianggap beruntung karena memiliki Pemerintah Daerah yang memperhatikan pendidikan Alumni SMA dan SMK nya. Masyarakat beranggapan bahwa melalui program SPP gratis peningkatan mutu Pendidikan Kabupaten Pangkep semakin baik dan dapat ditiru dan mengharumkan nama Kabupaten Pangkep.

Peneliti menyimpulkan bahwa Program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep memiliki tingkat kemudahan diamati (*observability*), terbukti dengan beberapa daerah yang datang ke Pangkep untuk belajar bagaimana menerapkan program seperti ini. Nilai jual Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu pendidikan juga dikenal oleh masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pangkep maupun dari luar Kabupaten Pangkep.

KESIMPULAN

Program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep memiliki keuntungan relatif (*relative advantage*) karena mempunyai manfaat yang sangat besar. Program ini mampu memberikan manfaat yang sangat besar bagi

masyarakat dan daerah Kabupaten Pangkep, meskipun pelaksanaannya belum efektif.

Program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep memiliki tingkat kesesuaian (*Compatibility*) karena sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep melihat bahwa APBD mencukupi untuk dikeluarkan program yang dianggap bisa menjadi solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Pangkep. Mahasiswa dan masyarakat serta Pemerintah Daerah berharap agar program ini tetap menjadi program andalan di Kabupaten Pangkep dan bisa untuk terus ditingkatkan agar masyarakat Kabupaten Pangkep bisa memiliki hidup yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep memiliki tingkat kerumitan (*complexity*) lebih rendah dibanding tingkat kemudahan dalam program ini, atau bisa dikatakan bahwa program ini memiliki lebih banyak kemudahan daripada kerumitan, sehingga program ini direspon baik oleh masyarakat Kabupaten Pangkep.

Program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep sebelum dijadikan Program rutin pernah

diujicobakan sebelumnya kemudian dilihat pengaruh dan manfaat yang ditimbulkan, program ini juga bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pangkep dan kemudian program ini dijalankan tiga tahun berturut-turut.

Program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep memiliki tingkat kemudahan diamati (*observability*), terbukti dengan beberapa daerah yang datang ke Pangkep untuk belajar bagaimana menerapkan program seperti ini. Nilai jual Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu pendidikan juga dikenal oleh masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pangkep maupun dari luar Kabupaten Pangkep.

DAFTAR PUSTAKA

- Junior, Marten Prasetyo. 2016. Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Perizinan Penanaman Modal di BPPT Kota Semarang). *Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro*.
- Mahsyar, Abdul. 2011. Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1 (2)*.
- Mirnasari, Rina Mei. 2013. Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 1 (1)*.
- Muhajidun. 2016. Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa:

- Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan. *Jurnal Fakultas Agama Islam Vol 7 (I)*.
- Mulyadi, Deddy,dkk. 2018. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Suharsaputra, Uhar. 2013. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharsaputra, Uhar. 2016. *Kepemimpinan Inovasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. STIA-LAN, Jakarta.
- Yuliana, Ratna. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang*.
- Zaenal. 2017. Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep. *Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin Makassar*.